

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Abdullah Sulaeman, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 1991.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Surabaya, 2007,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Benhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Effendi Perangin-angin, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1982.
- Friedmann, *Legal Theory*, Third Ed. Stevens & Sons Limited London, 1953.
- H.Idlam, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

- Maria S.W, *Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan “Forum Diskusi Altertatif”*, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, 1994
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009.

## **2. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 beserta Amandemennya, Fokus Media, Bandung, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda yang Ada Di Atasnya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Cepat Antar Jakarta dan Bandung.

### 3. Sumber Lainnya :

Achmad Dwi Afriyadi, *Kereta Cepat Jakarta-Bandung*, Liputan6, <http://bisnis.liputan6.com/read/2660590/>, tertanggal 24 Maret 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://.kbbi.web.id/> diakses pada 21 juni 2017.

Ramadhan Muawad, *Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Wordpress, <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2015/10/28/hak-atas-tanah-dan-peralihan-hak-atas-tanah-dalam-hukum-tanah-nasional-2/>, tertanggal 23 Maret 2017.

Wiji Nurhayat, *Kereta Cepat Jakarta-Bandung*, Kumparan, <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/pinjaman-dana-proyek-kereta-cepat>, tertanggal 24 Maret 2017.